
**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, LEGAL AUDIT DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN SISTEM
INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah)**

Sobrotul Intikhanah¹, Wizwik Lukmana²

^{1,2} Program Studi Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
emmaferdiz.umpp@gmail.com

Diterima : Tanggal 26 Agustus 2024 Direvisi : Tanggal 30 Agustus 2024

Disetujui : Tanggal 1 Desember 2024

Abstrak

Penelitian ini menguji tentang pengaruh kompetensi aparatur, sistem informasi, legal audit, dan sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan barang milik negara (Studi kasus pada Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel pada penelitian ini adalah pengguna dan pengurus Barang Milik Negara (BMN) sebanyak 36 responden. Populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan pengguna barang selaku Kasubbag barang milik negara, pengurus barang milik negara dan pembantu pengurus barang milik negara pada Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah dengan teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling tehniq. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda dengan alat bantu SPSS versi 22.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi aparatur, sistem pengendalian intern dan legal audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan barang milik negara. Sedangkan sistem informasi memoderasi secara semu pengaruh legal audit terhadap pengelolaan barang milik negara namun tidak dapat memoderasi pengaruh SPI terhadap pengelolaan BMN dan juga tidak dapat memoderasi pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap pengelolaan barang milik negara.

Kata Kunci : *pengelolaan barang milik negara, kompetensi aparatur, sistem informasi, legal audit, dan sistem pengendalian internal*

**THE EFFECT OF COMPETENCE OF THE APPARATUS,
INTERNAL CONTROL SYSTEM AND LEGAL AUDITS ON
STATE -OWNED ASSETS AND INFORMATION SYSTEM AS A
MODERATING**

ABSTRACT

This study aimed to examine and obtain empirical evidence regarding the effect of apparatus competence, information systems, legal audits, and internal control systems on the management of state property (a case study at the Technical Implementation Unit of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights). Since the research was quantitative, it used multiple linier regression with SPSS version 16.0 as the method of data

analysis. The sample was 36 respondents while the population was all users of the goods as Head of Subdivision of state property, administrator of state property, and assistant to the administrator of state property at the Technical Implementation Unit of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Central Java Province. The sampling technique used total sampling technique. The result stated the competence of the apparatus

The results stated the competence of the apparatus, internal control system and legal audits had a significant effect on the management of state property. Meanwhile, the information system as a quasi moderating to the effect of legal audit on the management of state property. Otherwise it cannot either be moderating the effect of SPI on the management of BMN and the effect of Apparatus Competence on the management of state property.

Keyword : state property management, apparatus competence, information system, legal audit, and internal control system.

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Barang Milik Negara. Barang milik negara merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa di masa lalu yang mempunyai manfaat ekonomi dan social di masa depan (*future*) yang diharapkan dapat diperoleh pemerintah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan menggunakan satuan uang, termasuk sumber daya non financial yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat dan sumber daya (*resource*) yang dipelihara dengan alasan sejarah (*history*) dan budayah (*culture*) (Rahmad, 2013). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 barang milik negara (BMN) adalah semua yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dan berwujud (*tangible*) seperti persediaan dan aset tetap. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) di PP No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D yang telah di ubah menjadi PP Nomor 28 tahun 2020, Menteri Dalam Negeri berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan BMN/D yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMN/D. Menurut Permendagri No.19 Tahun 2016 pengelolaan BMN/D adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Ferawati (2012) menyatakan bahwa faktor terpenting untuk dapat melihat perkembangan suatu perusahaan/organisasi terletak dalam pengelolaan barang atau aset yang dimilikinya, begitu juga halnya dalam sistem pemerintahan. Barang Milik Negara (BMN) atau aset yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintahan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara.

Menurut Hidayah, Damayanti, Yeasy & Maihendri (2016) menyatakan bahwa masih banyak daerah- daerah di Indonesia yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK namun kegiatan pengelolaan barang milik negara/daerah masih menjadi perhatian karena masih banyak daerah yang belum optimal dalam pengelolaannya sebagaimana di tegaskan oleh Nahartyo (2013) dan Salle (2019) yang menyatakan bahwa sejumlah daerah - daerah di Indonesia mengalami penurunan opini dari BPK dikarenakan kurang mampu dalam mewujudkan pengelolaan barang milik negara/aset secara baik.

Hasil revaluasi (penilaian kembali) yang dilaksanakan pada bulan Juni Tahun 2018 yang diikuti 66 satuan kerja di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah yang mana terdapat 25 Satker yang menjadi target revaluasi BMN tahun 2017 dan sebanyak 41 satker menjadi target revaluasi BMN tahun 2018, , menunjukkan bahwa masih terdapat barang miliki negara yang tercatat secara administrasi tidak tersedia secara fisik /hilang di dalam Satuan Kerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Rutan Pekalongan, Lapas Kelas 1 Semarang, Lapas Perempuan Semarang, Lapas Pemuda Plantungan, Rutan Batang, Lapas Terbuka Nusakambang dan Kantor Imigrasi Semarang. Sementara barang milik negara yang tercatat secara fisik jumlahnya lebih dari yang tercatat secara administrasi ditemukan pada satuan kerja Lapas Permisian Nusakambangan, Lapas Kelas I Semarang, Rutan Salatiga, Lapas Kendal, Lapas Perempuan Semarang, Lapas Pekalongan, Rutan Pemalang, Bapas Purwokerto, Rutan Banyumas, Lapas Cilacap, Lapas Pemuda Plantungan, Rutan Batang, Lapas Terbuka Kendal, Lapas Narkotika Nusakambangan, dan Rupbasan Purbalingga. (Kementerian Hukum dan HAM, 2018).

Hal ini juga didukung dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2018 dan 2019 yang menunjukkan bahwa masih ditemukannya kelemahan dalam pengelolaan barang milik negara di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah, temuan tersebut diantaranya: (1) Koreksi pencatatan nilai di Kanwil Jawa Tengah sebesar Rp 571.643.205 yang merupakan pengurangan luas tanah bangunan Rumah Negara Gol I tercatat pada aplikasi Simak BMN 11.550 m². (2) Ditemukan aset berupa gudang barang sitaan negara (basan) yang belum di inventarisasikan oleh Satker BMN di Rubasan Semarang senilai Rp. 731.100.000. (3) Koreksi pencatatan di Rutan Batang senilai Rp190.758.333, yang merupakan tindak Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen NUP 1 (masjid kompleks) sedangkan Jalan Khusus Kompleks NUP 2 menjadi fasilitas dan menambah nilai Bangunan Gedung Rutan Kelas II NUP 1. (4) Koreksi kesalahan IP di Lapas Pekalongan senilai Rp. 73.681.599.000 yang merupakan penyesuaian hasil penilaian (nilai wajar) barang ditemukan tahun 2017/2018 menjadi hasil penilaian baru tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Tim Penilai KPKNL (5) Koreksi revaluasi barang berlebih pada gedung dan bangunan di Rutan Pekalongan senilai Rp. 341.806.000 dan Lapas Cilacap sebesar Rp. 90.055.000 yang merupakan penyesuaian hasil penilaian (nilai wajar) barang tahun

2017/2018. (6) Koreksi kesalahan catat kode akun Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I menjadi Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya di Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang senilai Rp. 16.400.081.

Hadirnya sistem informasi sebagai variabel moderasi karena dengan adanya sistem informasi dapat menginteraksi pengaruh kompetensi aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Legal Audit terhadap pengelolaan BMN. Sistem informasi mempunyai peranan penting dalam pengelolaan barang milik negara karena karena apabila dirancang dan dilaksanakan dengan baik mampu memberikan jaminan atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMN berjalan efisien dan efektif (Rosihan et al., 2017). Sistem informasi manajemen mampu mempengaruhi efektivitas manajemen aset pada sektor publik sebagaimana hasil penelitian Ekayanti et al.,(2018) dan Juliadi (2017). Temuan ini juga didukung oleh Arlini et al., (2014); Azhar (2017); Azhar et al., (2013); Mainar et al., (2017) dan Rosihan et al.,(2017). Selain Pemanfaatan sistem informasi perlu dioptimalkan untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja (Sari dan Witono, 2014). Berdasarkan fenomena tersebut maka menarik untuk diteliti apakah kompetensi aparat, sistem pengendalian internal, legal audit berpengaruh terhadap pengelolaan BMN/D dengan di moderasi oleh variabel sistem informasi.

II. Literatur review dan hipotesis

Pengelolaan barang milik negara diatur dalam PP No 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/ daerah yang diubah dengan PP No 28 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan BMN/D meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan dan pengendalian aset tetap.

Praktik pengelola BMN/D

Pengelolaan BMN/D akan berjalan baik jika sumberdaya yang menangani mempunyai kompetensi dan pengetahuan yang memadai untuk itu kompetensi aparatur dapat mempengaruhi pengelolaan BMN/D. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara bahwa kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. Sedangkan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan kerja organisasi negara. Dengan demikian aparatur sipil negara dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan tugas dan

jabatannya. Karena dengan memiliki kompetensi yang tinggi dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan serta meningkatkan nilai kompetensi diri sendiri dan/atau fungsi jabatan. Penelitian Janet T. Latuharhary, Michael S. Mantiri, Stefanus Sampe (2021), Ritha Belo (2018), Ramadhani (2018), Yuni (2018), Hedy Masitha (2019) Zaki (2020), syarbini Ikhsan (2020) menyatakan secara empiris kompetensi aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen aset tetap. (Sedmihradská, 2010); (Campanano & Masic, 2018), (Sedmihradská, 2010) secara umum mendukung bahwa pengelolaan aset membutuhkan sumberdaya manusia yang kompeten.

H1 : Kompetensi Aparatur berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Sistem pengendalian intern mempunyai peran meningkatkan efektivitas pengelolaan BMN/D. Sistem pengendalian internal lebih menekankan pada tindakan pencegahan untuk mengurangi kekeliruan (tidak sengaja) dan ketidakberesan (sengaja) sehingga pelaporan dapat memenuhi nilai keterandalan (Sari dan Witono, 2014). Sistem pengendalian intern memiliki peran dan fungsi yang signifikan dalam meminimalisasi salah saji pencatatan akuntansi dengan adanya sinergi antara unsur-unsur dalam sistem pengendalian intern antara lain: terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, terselenggaranya aktivitas pengendalian, terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi, serta terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian (Mulyani dan Suryawati, 2011). Oleh karena itu semua komponen sistem pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta monitoring atas manajemen aset harus dibangun secara memadai. Hidayat (2017) dalam penelitiannya menemukan penyebab permasalahan inventarisasi aset tetap terletak pada sub-unsur sistem pengendalian intern pemerintah yaitu unsur lingkungan pengendalian yang dimaknai melalui rendahnya kompetensi dan *role overload*, unsur informasi dan komunikasi yang dimaknai melalui kurang koordinasi, unsur kegiatan pengendalian yang dimaknai dengan tidak dilaksanakannya penghapusan dan tidak dilaksanakannya sensus BMD. Sebagaimana temuan Ekayanti et al., (2018), Juliadi (2017), Hamidah (2014) dan Mainar et al., (2017). Penelitian Yuli Astini (2018), Zaki (2020) dan Yuliana, dkk (2021) juga menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap efektivitas manajemen aset tetap.

H2 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Legal audit aset merupakan suatu tindakan pengendalian dan pengamanan atas kegiatan yang berhubungan dengan pemeriksaan dari legalitas aset mulai dari proses administrasi pengadaan barang, hak kepemilikan aset, pengalihan atas penguasaan aset, serta mengenai

pemecahaan atau solusi atas setiap permasalahan aset yang bersifat administrasi maupun tindakan hukum (Amah Rusli,2020). Meningkatnya tindakan pengendalian legal audit yang baik di suatu instansi/organiasai pemerintah, maka pengelolaan aset/barang milik negara dapat dilakukan secara optimal terutama dalam hal pengamanan, pemeliharaan dan pemanfaatan aset/barang milik negara. Penelitian Paranga (2020), Sukmini Hartati, Rita Martini, Hadi Winarko (2019) dan Umbora (2018), Widya (2018), Amah Rusli (2020), Yusuf (2019) memberikan bukti empiris bahwa legal audit menjadi salah satu faktor penentu dalam pengelolaan BMN/D.

H3 : Legal audit berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

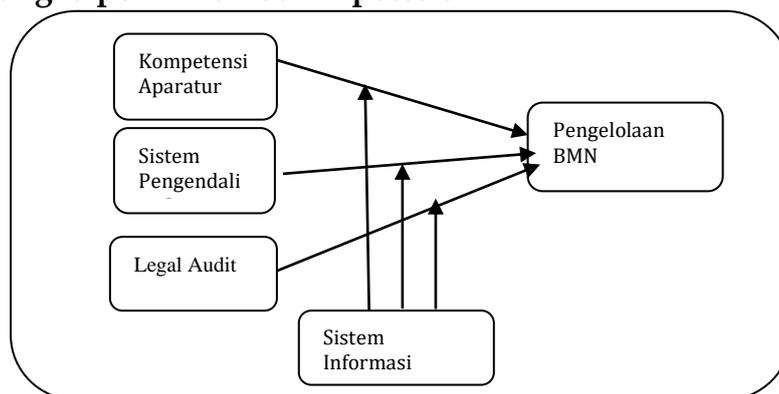
Sesuai dengan amanah UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, pemerintah menyelenggarakan sistem pengelolaan BMN/D melalui SIMA BMN/D. SIMA BMN/D dipergunakan untuk mencatat dan mengorganisir BMN/D mulai dari kegiatan perencanaan, penganggaran sampai dengan penatausahaan barang milik negara/aset. Dengan adanya sistem manajemen aset diharapkan semua barang milik/aset akan aman dan terjaga dengan baik, selain itu semua barang mili negara/aset dapat terdata dengan tertib dan rapi didalam sebuah laporan yang akurat,dapat dipercaya serta tepat waktu dalam pengerjaannya. Laporan pengelolaan barang milik negara yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan seperti informasi posisi keuangan di di disuatu lembaga/organisasi pemerintah. Hadirnya sistem informasi dapat menginteraksi kompetensi aparatur dalam pengelolaan BMN, mempercepat penyajian informasi, mendukung pengendalian internal dalam pengelolaan BMN/D dalam menjaga dan melindungi aset, selain itu sistem informasi mendukung proses pengawasan dan pengendalian secara efektif

H4 : Sistem Informasi Menginterkasi pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Pengelolaan BMN/D

H5 : Sistem Informasi Menginterkasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan BMN/D

H6 : Sistem Informasi Menginterkasi pengaruh Legal audit terhadap Pengelolaan BMN/D

Kerangka pemikiran dan hipotesis



Gambar 1 Model Penelitian

III. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris kuantitatif, Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur sipil di UPT Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah. Sampel dalam penelitian ini yaitu kasubag BMN, Pengurus Barang BMN dan pegurus barang pembantu di lingkungan kemenkumham wilayah propinsi Jawa Tengah. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan *total sampling* teknik yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil total sampling karena jumlah populasi yang kurang dari 100 (Sugiyono,2009).

Pembahasan operasionalisasi variabel dan indikator yang di gunakan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel agar lebih memudahkan pemahaman. Variabel-variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 tabel operasionalisasi variabel

No.	Nama	Definisi	Indikator
1	Kompetensi Aparatur (I)	Kompetensi aparatur adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien	Skala likert 1-5 dengan indikator (1) pegetahuan; (2) ketrampilan; (3) sikap.
2	Sistem Pengendalian Intern (I)	Sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Skala likert 1-5 dengan menggunakan indikator pertanyaan tentang (1) lingkungan pengendalian; (2) penilaian resiko; (3) kegiatan pengendalian; (4) informasi dan komunikasi; (5) pemantauan pengendalian internal.

3	Legal Audit (I)	Legal audit merupakan tindakan pengamanan atau tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum.	Skala likert 1-5 dengan menggunakan indikator (1) penagaman secara fisik; (2) pengamanan secara administrasi; (3) tindakan hukum.
4	Sistem Informasi (Z)	Sistem Informasi adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Barang Milik Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan	Skala likert 1-5 dengan menggunakan indikator (1) sarana dan prasarana yang memadai; (2) Pemahaman penggunaan sistem informasi; (3) Penyaringan informasi yang uptade dan akurat; (4) pengoptimalan <i>database</i>
5	Pengelolaan BMN (D)	Aktivitas meliputi perencanaan Kebutuhan dang penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian	Indikator untuk pengelolaan barang milik negara (BMN) dalam penelitian ini sesuai dengan PP No.27 tahun 2014

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan quisioner dengan skala *likert 1-5*. Untuk memberikan keyakinan atas instrumen yang di gunakan dilakukan uji validitas dan reliabilitas . Alat uji yang di gunakan uji fit model dengan uji asumsi klasik, uji signifikansi (uji t) dan uji koefisien determinasi (R2) dan sedangkan untuk menguji variabel moderasi digunakan *Moderated Regression Analysis* dengan struktur model persamaan untuk membentuk dan mengetahui efek moderasi dan jenisnya sebagaimana berikut ini:

model persamaan pertama yaitu:

$$BMN = \beta^0 + \beta1^KA$$

$$BMN = \beta^0 + \beta1^KA + \beta2^ SI + e$$

$$BMN = \beta^0 + \beta1^KA + \beta2^ SI + \beta3^KA * SI + e$$

Model persamaan 2

$$BMN = \beta^0 + \beta1^LA$$

$$BMN = \beta^0 + \beta1^LA + \beta2^ SI + e$$

$$BMN = \beta^0 + \beta1^LA + \beta2^ SI + \beta3^LA * SI + e$$

Model persamaan 3

$$BMN = \beta^0 + \beta1^SPI$$

$$BMN = \beta^0 + \beta1^SPI + \beta2^ SI + e$$

$$BMN = \beta^0 + \beta1^SPI + \beta2^ SI + \beta3^SPI * SI + e$$

Dari hasil tersebut jika diketahui terdapat pure moderasi atau quasi moderasi maka langkah selanjutnya dilakukan MRA (*Moderated Regression Analysis*) dengan model persamaan sebagaimana berikut ini:

$$BMN = \beta^0 + \beta1^KA + \beta2^ SPI + \beta3^LA + \beta4^ SI + \beta5^KA * SI + \beta6^ SPI * SI + \beta7^4 LA * SI + e$$

KA : Kompetensi Aparatur

- SPI : Sistem Pengendalian Internal
- LA : Legal Audit
- SI : Sistem Informasi
- BMN : Pengelolaan BMN

IV. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan data hasil quisioner dan di lakukan tabualsi data , di peroleh data diskripsi statistik sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BMN	36	192.00	255.00	240.3333	21.38892
KA	36	54.00	75.00	69.8056	7.39042
SI	36	28.00	35.00	33.4167	2.39494
LA	36	18.00	25.00	23.5278	2.24863
SPI	36	104.00	115.00	111.1944	3.86057
Valid N (listwise)	36				

Selanjutnya uji hopotesis dilakukan untuk memperoleh bukti secara empiris dan menganalisis pengaruh Kompetensi Aparatur, Legal Audit, Sistem Pengendalian Intern terhadap pengelolaan BMN. Sebelum dilakukan uji regresi berganda dilakukan uji kelayakan model yaitu uji asumsi klasik dan di peroleh hasil bahwa model regresi linier berganda dinyatakan layak karena data berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinieritas, bebas homoskedastisitas, dan bebas autokorelasi. Hasil pengujian untuk menjawab Hipotesis 1 sampai hipotesis 4 digunakan dengan bantuan software SPSS versi 22 sebagaimana tabel berikut ini :

Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen serta seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen dalam model persamaan regresi dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2
Hasil uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Std. Error	Beta		
(Constant)	-73.202	50.241		-1.457	.155
KA	1.793	.315	.620	5.700	.000
LA	2.286	.963	.240	2.374	.024
SPI	.994	.415	.179	2.397	.023

a. Dependen variebel :BMN

Uji statistik t

Berdasarkan tabel 4.2 uji parsial t dengan kreteria jika nilai signifikansi lebih kecil dari nilai α 5 % maka secara parsial statistik dapat menyatakan bahwa hipotesis diterima dan sebaliknya. Berdasarkan tabel diatas maka Kompetensi Aparatur, Legal Audit dan Sistem Pengendalian Internal secara statistik berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan barang milik negara. Berdasarkan tabel 4.2 dapat di simpulkan bahwa Hipotesis (H1), (H2) dan (H3) dapat di terima dan dapat disusun model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$BMN = -73,202 + 1,793 KA + 0,994 SPI + 2,286 LA + e$$

Sedangkan hasil regresi dari pengujian tersebut tampak sebagaimana berikut:

Tabel 4.3

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.937 ^a	.878	.863	7.92810

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut secara statistik dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan variabel Kompetensi Aparatur, Sistem Informasi, Legal Audit dan Sistem Pengendalian Internal terhadap pengelolaan BMN diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,878 atau 87,80 % yang dapat disimpulkan variabel-variabel tersebut memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap pengelolaan BMN sebesar 87,80 % dan lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Hasil dari pengujian variabel moderasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Uji moderasi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-158.289	944.643		-.168	.868
KA	2.617	.223	.904	11.757	.000
SPI	3.261	.727	.589	4.486	.000
LA	7.441	.991	.782	7.509	.000
KA*SI	.018	.014	.297	1.264	.215
LA*SI	-.872	.289	-.4299	-3.016	.005
SPI*SI	-.166	.156	-.2158	-1.063	.296

a. Dependent Variable: BMN

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagaimana berikut ini :

$$\text{BMN} = -158,289 + 2,617 \text{ KA} + 3,261 \text{ SPI} + 7,741 \text{ LA} + 0,018 \text{ SI} * \text{KA} - 0,872^{\wedge} \text{LA} * \text{SI} - 0,166^{\wedge} \text{SPI} * \text{SI} + e$$

Berdasarkan tabel tersebut dapat di simpulkan bahwa interaksi Sistem Informasi terhadap Kompetensi Aparatur secara statistik dinyatakan tidak signifikan pada level 5 %. Sebelum terjadi interaksi variabel Kompetensi Aparatur signifikan pada level 5 %. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi tidak dapat memoderasi Kompetensi Aparatur dalam mempengaruhi pengelolaan BMN. Begitupula variabel Sistem Pengendalian Internal secara statistik signifikan terhadap pengelolaan BMN namun kehadiran variabel Sistem Informasi sebagai variabel moderasi menjadikan SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan BMN. Sedangkan interaksi variabel Sistem Informasi terhadap Legal Audit mempunyai taraf signifikan $0,005 < 0,05$, dengan demikian dinyatakan secara statistik interaksi variabel Sistem Informasi dengan Variabel Legal Audit secara statistik signifikan pada level 5 %. Berdasarkan tabel diatas sebelum interaksi dengan variabel Sistem Informasi, Legal Audit secara signifikan mempengaruhi pengelolaan BMN sehingga hadirnya variabel Sistem Informasi mampu menjadi quasi moderasi bagi variabel Legal Audit.

B. PEMBAHASAN

Hasil Uji Hipotesis 1 (H1) tentang Kompetensi Aparatur mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan BMN hal ini dapat di jelaskan bahwa semakin tinggi kompetensi aparatur semakin baik pengelolaan BMN. Dari hasil kuisioner diketahui rata-rata kompetensi aparatur berada pada kisaran nilai 4,65 dari seluruh responden sehingga disimpulkan bahwa kompetensi aparatur dalam hal ini pengelola dan pengurus BMN mempunyai pengetahuan yang baik, kemampuan yang baik dalam mengelola BMN termasuk mempunyai sikap yang baik dalam pengelolaan BMN karena rata-rata pengurus BMN mengetahui tentang regulasi dan sanksi dan memahami bahwa BMN merupakan aset milik negara sehingga harus di perlakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku karena pengurus barang menyadari jika terjadi BMN hilang akan mengakibatkan TGR (Tuntutan Ganti Rugi) dan mereka menyadari bahwa hal itu menjadi tanggungjawabnya.

Hipotesi 2 (H2) diterima dan dinyatakan bahwa SPI secara positif signifikan mempengaruhi pengelolaan BMN, semakin baik SPI ddilingkungan kantor wilayah kemenkumham propinsi Jawa Tengah semakin baik pengelolaan BMN. Hal ini dapat di jelaskan berdasarkan hasil jawaban atas kuisioner bahwa SPI pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah dinyatakan baik dan mendukung pengelolaan BMN. Hal ini dapat

dijelaskan bahwa lembaga tersebut telah mempunyai SOP, Standar dan penilaian serta *punishment* yang tegas dan berlaku untuk mengendalikan resiko yang dimungkinkan terjadi atas pengelolaan BMN, aktivitas pengendalian dilakukan secara rutin dan ketat, peran pemantauan dan pengawasan dilakukan secara ketat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dinyatakan secara umum pengendalian internal yang berlaku sangat baik dan mendukung pengelolaan BMN.

Hipotesis ketiga (H3) juga diterima. Artinya Legal Audit berpengaruh secara positif signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan BMN dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dijelaskan semakin baik dan tertib legal audit semakin baik pengelolaan BMN. Hasil kuisioner menjelaskan bahwa pengelola dan pengurus BMN telah mematuhi dan memahami peraturan terkait dengan pengelolaan BMN sehingga pengurus BMN telah mencatat dan menatausahakan BMN pada lingkungan Satker dengan baik, mempunyai administrasi yang tertib, inventarisasi dan labelisasi BMN dilakukan secara tertib sesuai Surat Edaran Nomor SEK.PL.03.03-134 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan BMN di Lingkungan Kemenkumham. Pemahaman tentang adanya Tuntutan Ganti Rugi (TGR) oleh semua pengurus dan pengelola BMN mendorong perilaku hati-hati dan tertib administrasi serta penyimpanan aset negara yang baik dilakukan oleh pengurus dan pengelola BMN dilingkungan Satker.

Hipotesis ke empat (H4) yang menyatakan Sistem Informasi Menginteraksi pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Pengelolaan BMN/D tidak dapat diterima /ditolak. Hadirnya sistem informasi tidak dapat menginteraksi pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap pengelolaan BMN karena adanya kesadaran yang baik bagi pengurus dan pengelola BMN dilingkungan Satker dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan semua aktivitas telah dijalankan dengan penuh kesadaran dari pengurus BMN sehingga sistem informasi tidak dapat berperan memperkuat atau memperlemah kompetensi aparatur dalam pengelolaan BMN, namun telah menjadi sarana yang digunakan dalam pengelolaan BMN.

Hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa Sistem Informasi Menginteraksi pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan BMN tidak dapat diterima /ditolak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kehadiran Sistem Informasi tidak mampu mempengaruhi hubungan antara SPI dengan pengelolaan BMN karena pada lingkungan satker utamanya pengelola dan pengurus BMN telah menjalankan SPI dengan baik sehingga hadirnya sistem informasi tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan variabel SPI terhadap pengelolaan BMN karena SPI telah menjadi budaya dan komitmen pengelola dan pengurus BMN di lingkungan satker kemenkumham.

Hipotesis keenam (H6) yang menyatakan Sistem Informasi menginterkasi pengaruh Legal audit terhadap Pengelolaan BMN/D dinyatakan di terima. Hal ini dapat di jelaskan bahwa sistem informasi dapat memperkuat variabel Legal Audit dalam mempengaruhi pengelolaan BMN karena tertib administrasi yang dijalankan dalam satker akan lebih banyak menggunakan sistem informasi meskipun pencatatan manual dilakukan oleh pengelola atau pengurus barang melalui Kartu Inventaris Barang. Kesadaran pengelola dan pengurus barang dalam melakukan tertib administrasi barang ini sangat tinggi didorong oleh pemahaman terhadap regulasi dan pengetahuan bahwa meskipun barang atau aset secara phisik ada dii lingkungan staker namun kepemilikannya menjadi milik negara sehingga harus di jaga dan diamankan serta di inventarisasi dengan baik.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil Penelitian yang dilakukan dapat di simpulkan bahwa pengaruh kompetensi aparatur, Sistem pengendalian intern dan legal audit secara signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan BMN. Sedangkan hadirnya Sistem informasi sebagai variabel moderasi tidak dapat memoderasi pengaruh Kompetensi aparatur terhadap pengelolaan BMN demikian juga dengan variabel SPI tidak dapat di moderasi oleh sistem informasi dalam mempengaruhi pengolaan BMN, namun variabel Sistem Informasi dapat menjadi quasi moderasi bagi pengaruh legal audit terhadap pengelolaan BMN.

Penelitian ini memberikan penjelasan secara empiris terkait dengan pengaruh kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal dan Legal Audit dan sistem informasi sebagai variabel moderasi terhadap Pengelolaan BMN khususnya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah, namun dalam penelitian ini peneliti masih mempunyai keterbatasan:

- a. Penelitian menggunakan obyek penelitian di kemenkumham wilayah jawatengah sehingga hasil penelitian dapat berbeda pada satker atau lingkungan yang lain
- b. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan quisioner, untuk penelitian selanjutnya mungkin dapat di gunakan data sekunder dalam memotret pengelolaan BMN misalnya tentang akuntabilitas pelaporan BMN/D sehingga dapat menambah pengetahuan tentang pemahaman pengelolaan aset di lingkungan pemerintahbaik pusat atau daerah
- c. penelitian juga dapat dikembangkan untuk pemerintah daerah sehingga dapat di ketahui pengelolaan barang (aset) di lingkungan pemerintah daerah

Saran

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel independen yang lain (selain kompetensi aparatur, sistem informasi, legal audit, dan sistem pengendalian internal) yang mempengaruhi pengelolaan barang milik negara. Sehingga pemahaman tentang pengelolaan barang milik negara beserta factor-faktor yang mempengaruhinya dapat dikaji dengan lengkap misalnya seperti variabel Optimalisasi Aset, Struktur Organisasi, Kompensasi, Komitmen Pimpinan, dan Kepatuhan Regulasi.

Daftar Pustaka

- Arlini, M., Darwanis, & Abdullah, S. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Regulasi, dan Kompensasi Terhadap Manajemen Aset (Studi Pada Satuan Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Indonesia). *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana*
- Azhar, I . (2017). *Pengaruh Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Banda Aceh*. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 1(2), 150-160.
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia . (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi TA 2019*. Jakarta.
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2018*. Jakarta.
- Bels, Beatrix Elsy. (2015). *Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Tetap (Tanah dan Bangunan)*. Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Universitas Gajah Mada : Tesis.
- Brown, Kerry, Marien Laue, Robyn Keast, Nateque Mahmood, Anna Wiewiora, Ms Jane Montgomery. (2012). *Pedoman Sistem Terpadu Pengelolaan Aset Yang Strategis, Australia Asset Management Colaborative Group (AAMCOG): Research Center, Faculty of Law, Queensl and University of Technology (QUT) for assisting with the translati on of this Guide .*
- Camparano, Alessandra, and Joanna Masic. 2018. "Municipal Asset Management in China's Small Cities and Towns: Findings and Strategies Ahead." *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 2(1): 142.
- Demetouw, M., Salle, A & Asnawi, M. (2016). *Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Jayapura*. *Jurnal Keuda*, Vol. 2 No. 2:1-12.
- Hamidah, R. T. (2014). Pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan sumber daya manusia terhadap pengamanan aset negara (Studi Empiris Pada Kementerian Perindustrian Wilayah Jawa Sumatera). Universitas Negeri Padang.

- Hedya Masitha. (2019). *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Bandung*. Universitas Padjadjaran Bandung .
- Irawati Pangat, Tri Handayani Amalia, Lukman Prakaya. (2020). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pengelolaan Aset Daerah (Studi kasus pada DPPKAD di Kota Gorontalo)*. Jambura Accounting Review, Volume 1 No. 1 Februari 2020, Hal 13-21: Journal homepage:<http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>. E-SSN 2721-3617.
- Irwan Mansyur. (2018). *The Influence of Asset Inventory, Quality of Human Resources and Leadership Commitment to Optimization of Asset Management and Quality of Financial Statements Regional Government of Taliabu Islands Regency*. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Volume X. Edisi 2 Desember 2018.
- James A O'Brien and George M. Marakas. (2016). *Analisis Sistem Informasi/ Tata Sotabri Ed.I*. Yogyakarta : Andi.
- Janet T. Latuharhary, Michael S. Mantiri, Stefanus Sampe. (2021). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pengelolaan Aset Daerah*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Juliadi, M. . (2017). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah, Sistem Informasi Manajemen Aset, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Efektivitas Manajemen Aset Tetap Pemerintah Kota Mataram* . Universitas Mataram.
- Juliessi Paranga. (2020). *Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Papua* . Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 5, Nomor 1, April 2020 : 54-79.
- Mainar, Darwanis, Syukriy Abdullah, dkk. (2017). *Pengaruh Sistem Informasi Pengendalian Intern, Pemahaman Regulasi, dan Sistem Informasi Terhadap Manajemen Aset*. Banda Aceh: Jurnal Akuntansi .
- Muhammad Zaki. (2020). *Pengaruh Kualitas Aparatur, Sistem Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Efektivitas Manajemen Aset Tetap (Studi kasus pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh)*. Universitas Muhammadiyah Aceh.
- Ria Eka Yuliana, Taufeni Taufika dan Nasrizah. (2021). *Pengaruh Kualitas Aparatur, Regulasi, Sistem Informasi Manajemen, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Efektivitas Manajemen Aset Tetap di Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Komitmen Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi*. Universitas Riau: Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol 5 No 2 Juni 2021 215-225.
- Rosihan, Bharranti, B.E & Ratang, W. (2017). *Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi. Sistem Informasi dan Komitmen terhadap Manajemen Aset (Studi pada Pemerintah Provinsi Papua)*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, 2(1), 1-16 .
- Sarbini, Syarbini Ikhsan. (2020). *Pengaruh Implementasi Pengendalian Internal dan Kompetensi Pengelolaan Terhadap Efektivitas Manajemen Aset Tetap pada Peguruan Tinggi Negara Berbadan Hukum di Indonesia*. JAAKFE Vol.10,No.2 Des, 2020 hal 25-43.
- Alika, B., Malik, Z. A., & Bayuni, E. M. (2018). Tinjauan

- Fatwa DSN MUI Nomor 43 / DSN-MUI / VIII / 2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) Terhadap Penalty pada Pencairan Deposito Mudharabah Sebelum Jatuh Tempo di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung Fatwa Review Of DSN MUI Number 43 / DSN-MUI / VII. *Prosiidng Hukum Ekonomi Syariah*, 1(43), 424–430.
- Campanaro, A., & Masic, J. (2018). Municipal asset management in China's small cities and towns: Findings and strategies ahead. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 2(1), 142. <https://doi.org/10.24294/jipd.v2i1.161>
- Departemen Agama RI. (2006). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.
- Fithrayudi, M., Prayugo, K., & Yohani, Y. (2023). Pengaruh Rasio-Rasio Terhadap Metode Altman Z-Score Dalam Memprediksi Financial Distress Pada Harga Saham Perusahaan Subsektor Perdagangan Ritel. *Neraca*, 18(2), 40–51. <https://doi.org/10.48144/neraca.v18i2.1394>
- Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2022). *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Penerbit NEM.
- Khasanah, M. D. N. (2023). Penalti Dan Pengurangan Bagi Hasil Deposito Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di BMT Dana Mentari Cabang Karanglewas). *Skripsi*.
- Kusumadewi, A. P. (2020). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pengenaan Penalty Pada Pencairan Deposito Mudharabah Sebelum Jatuh Tempo Di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya*.
- Maruta, H., & Imron, I. (2020a). Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalty Deposito Mudharabah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 15–28. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.196>
- Maruta, H., & Imron, I. (2020b). Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalty Deposito Mudharabah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 15–28. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.196>
- Ma'wa, N. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti Pada Pengambilan Simpanan Berjangka (Deposito) Mud } a > Rabah Sebelum Jatuh Tempo Di Baitul Mal Wa Tamwil El Sejahtera Cipari Program Studi Hukum Ekonomi Syari " Ah Fakultas Syari " Ah Institut Agama Islam Negeri*. Ms. *Sulfiana_083133032.pdf*. (n.d.).
- Purwanti, S. (2023). *Kamus Perbankan*. Nuansa Cendekia.
- Said, U., Imtikhanah, S., & Khoirun, M. (2023). Kinerja Keuangan Koperasi Syariah Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang No. 1 Thn 2013. (Studi Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah Di Jawa Tengah). *Neraca*, 18(2), 60–76. <https://doi.org/10.48144/neraca.v18i2.1396>
- Sedmihradská, L. (2010). *Municipal asset management in transition countries: Selected case studies*.
- Sholahuddin, H. M. (2013). *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- Sherly, H.K & Mamalel, H. (2017). Pengaruh Inventarisasi, Legal Audit, Penilaian Dan Kondisi Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Blolango . e-journal.unsrat.ac.id, 2017:50-61.

-
- Sukmini Hartati, Rita Martini, Hadi Winarko. (2019). *Manajemen Aset Bagi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap*. Jurnal Riset Terapan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Sulistiawati E. (2016). *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Pimpinan sebagai Variabel Moderating*. Universitas Sumatera Utara.
- Suriana Oktavia Tampubolon. (2017). *Pengaruh Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian serta Sistem Informasi terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemda Kabupaten Serdang Begadai*. Universitas Sumatera Utara.
- Tiara Prihatini, dkk. (2020). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Regulasi, Kompensasi, Dan Asas - Asaa Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Aset Pada Badan Usaha Milik Daerah (Studi kasus pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang: E-JRA, 09(02), 02 Februari 2020.
- Vries, J.de. (2010). *Is New Public Management Really Dead?* OECD Journal on Budgeting. Vol. 2010/1.
- Willian Sandra. (2017). *Pengelolaan Barang Milik Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau*. Journal FISIP, 4(2), 2 Oktober 2017.
- Yuli Astini, dkk. (2018). *Kualitas Aparatur, Sistem Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Efektivitas Manajemen Aset Tetap*. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis, Vol. 13, No. 2, Juli 2018 .
- Yusuf. (2013). *The Effectiveness of Public Asset Management in Malaysia*. Queensland : Queensland University of Technology.